

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Public trust ialah sebuah istilah dengan mengacu pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi atau individu yang memegang jabatan penting dalam masyarakat. P. Rahayu & Trisnawati (2022) mendefinisikan *public trust* sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan orang lain atau suatu organisasi untuk dapat memenuhi harapannya dan berharap pihak yang dipercayai tidak akan merugikan dirinya. Kajian yang dilakukan oleh Nawawi (2012) menyebutkan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi kepercayaan diantaranya partisipasi masyarakat, ditegakkannya hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, serta akuntabilitas. Haning, Hasniati, & Tahili (2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan publik yang diperlukan adalah komitmen, kebajikan, kejujuran, kompetensi, keadilan, integritas, kepemimpinan, trust sebagai nilai utama, transparansi dan akuntabilitas.

Public trust tentunya sangat penting untuk keberlangsungan dan stabilitas organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya. Bagi lembaga pemerintahan, *public trust* berperan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk turut mempunyai rasa tanggung jawab akan berhasilnya sebuah program atau kegiatan pemerintah (Imawan, Irianto, & Prihatiningtias, 2019). Sedangkan bagi perusahaan, *public trust* membantu meningkatkan pemasaran dan penjualan karena pelanggan dan masyarakat semakin memungkinkan untuk melakukan pembelian produk ataupun jasa dari perusahaan atau bisnis yang dipercaya. Hal ini karena *public trust*

membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan memungkinkan untuk pelanggan melakukan pembelian kembali (Rizqulloh & Elida, 2015).

Selain lembaga pemerintahan dan perusahaan, organisasi keagamaan sebagai lembaga yang memiliki tujuan moral dan spiritual juga harus mampu membangun kepercayaan publik yang kuat. Organisasi keagamaan adalah organisasi nirlaba yang dalam aktivitas operasionalnya tidak berorientasi pada laba. Oleh karena itu, *public trust* memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi keagamaan dalam membantu meningkatkan sumber dana dan mempermudah untuk memperoleh bantuan dari masyarakat dan donatur. Jika masyarakat dan donatur percaya pada organisasi keagamaan, memahami tujuan dan sasaran organisasi tersebut, maka masyarakat dan donatur akan lebih berminat untuk berdonasi dan terus memberikan dukungan (Amalina, 2021). Sebaliknya, jika masyarakat dan donatur tidak percaya pada organisasi nirlaba, mereka mungkin ragu untuk berdonasi karena kurangnya keyakinan terhadap efektivitas dan kredibilitas organisasi.

Organisasi keagamaan, dianggap sebagai lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus kecurangan dan penyalahgunaan dana yang melibatkan organisasi keagamaan yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi keagamaan menurun. Merujuk pada beberapa liputan di media massa, terdapat sejumlah kasus permasalahan mengenai pengelolaan keuangan di organisasi keagamaan. Dalam liputan Kompas.com, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Zakat Infaq Sedekah senilai Rp 1,1 miliar. Di tahun 2013, Kompas.com memberitakan bahwa jemaat Gereja Bethany, Surabaya melaporkan

pihak pengelola gereja ke kepolisian terkait kecurigaan adanya korupsi dana gereja senilai Rp 4,7 triliun. Kasus tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang bagaimana dana dan sumber daya yang mereka berikan digunakan, dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi keagamaan. Kepercayaan publik yang menurun akan menyebabkan organisasi keagamaan kesulitan untuk memperoleh dukungan dan sumber daya dari masyarakat dan donatur (Amalina, 2021). Kasus penyalahgunaan dana di organisasi keagamaan yang mengakibatkan kepercayaan publik menurun menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi organisasi keagamaan. Sehingga dalam upaya untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan publik, organisasi keagamaan perlu mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sebagaimana disebutkan oleh Imawan et al. (2019) bahwa naik turunnya tingkat kepercayaan publik dipengaruhi oleh kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas ialah keharusan *agent* guna melakukan pemberian pertanggungjawaban, melakukan penyajian, pelaporan serta pengungkapan seluruh aktivitas kepada *principal* (Mardiasmo, 2018). Hal ini mengacu pula pada pengungkapan pada tindakan ataupun putusan yang sudah terambil di organisasi. Sedangkan transparansi memiliki arti dibangunnya dengan didasari oleh kebebasan untuk mendapatkan informasi (Mardiasmo, 2018). Dengan konsep dimana informasi tersebut harus jelas, akurat dan dapat diverifikasi mengenai kondisi keuangan organisasi. Laporan keuangan yang transparan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik adalah akurat dan dapat diverifikasi. Ini

membantu publik memahami bagaimana uang mereka digunakan dan memastikan bahwasannya dana publik dipakai dengan efisien serta efektif.

Teori *stakeholder* juga mengungkapkan bahwa *stakeholder*, berhak guna mendapatkan informasi tentang aktivitas dari organisasi yang memberikan pengaruh pada mereka (Widarjo, 2011). Artinya, organisasi wajib untuk memberikan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan tentang operasi dan keputusan yang diambil. Kewajiban organisasi keagamaan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tercantum pada peraturan seperti UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Keagamaan dan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) nomor 35 mengenai penyajian pelaporan keuangan entitas nonlabaa. Berdasarkan aturan tersebut penyusunan laporan keuangan organisasi keagamaan haruslah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan untuk kepentingan *stakeholder*-nya, yaitu umat atau jemaat, donatur, dan pemerintah. Terlebih bagi umat atau jemaat yang merupakan *stakeholder* utama dari organisasi keagamaan, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan menjadi hal yang penting. Hal ini yang akan menjadi penilaian masyarakat terhadap baik buruknya kinerja keuangan organisasi keagamaan (Suhendri & Iriani, 2021). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan membuat umat atau jemaat merasa yakin bahwa sumber daya yang mereka berikan digunakan dengan baik (Lasfita & Muslimin, 2020).

Bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi keagamaan bisa beragam pada 1 organisasi untuk organisasi lain. Namun, secara umum bentuk akuntabilitas dan transparansi yang sering diterapkan oleh organisasi keagamaan, yaitu pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Organisasi keagamaan membuat laporan

keuangan tahunan yang menjelaskan pendapatan dan pengeluaran organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan ini biasanya mencakup informasi tentang donasi yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan. Namun, organisasi keagamaan di berbagai negara dan wilayah sering kali mengalami tantangan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Beberapa organisasi keagamaan memang transparan dan akuntabel, tetapi ada pula yang mengalami masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Masih banyaknya publik yang terus bertanya mengenai akuntabilitas serta transparansi dalam beberapa organisasi keagamaan (Harahap, 2019; Hayati, 2022). Hal ini menyebabkan penerimaan organisasi tersebut menurun atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan karena masyarakat lebih memilih untuk berdonasi secara langsung atau ke tempat yang lebih mereka percayai.

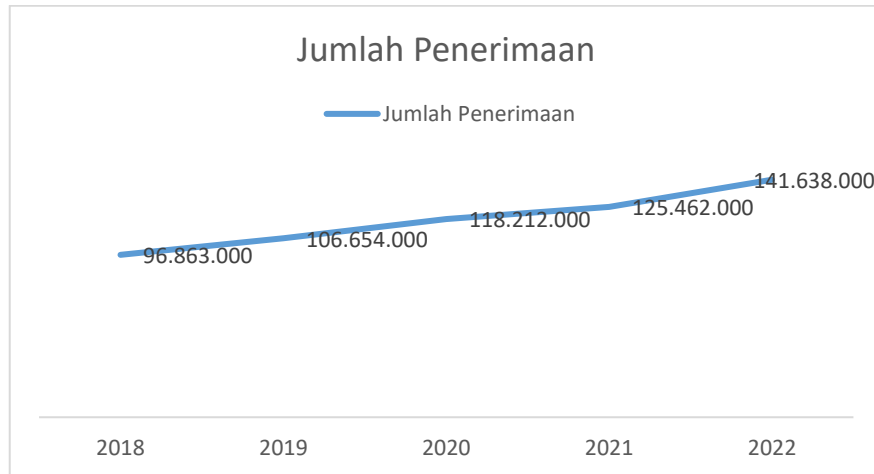
Gereja ialah suatu bentuk dari organisasi nirlaba yang bertujuan tidak melakukan pencarian laba. Pada melakukan tugas serta tanggung jawab gereja untuk memenuhi harapan dan kebutuhan jemaat, gereja bergantung pada sumber dana yang diberikan oleh jemaat atau masyarakat. Kepercayaan jemaat gereja terhadap pengelolaan keuangan gereja sangat penting, karena kepercayaan tersebut menjadi dasar untuk dukungan dan partisipasi jemaat dalam berbagai kegiatan gereja. Dampak menurunnya kepercayaan jemaat pada gereja yaitu menurunkan citra dan kredibilitas gereja, menimbulkan konflik internal, menurunkan jumlah persembahan/donasi hingga menurunnya jumlah jemaat yang mungkin pindah ke gereja atau bahkan berpindah iman, hal ini dikarenakan hilangnya kepercayaan jemaat (Wibowo & Kristanto, 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi gereja untuk mengungkapkan dengan benar

bagaimana pengelolaan keuangan gereja dilakukan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam penelitian terdahulu oleh S. B. Rahayu, Widodo, & Binawati (2019) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas serta transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan publik.

Meskipun keyakinan spiritual terhadap pemimpin gereja bisa menjadi salah satu faktor yang membuat anggota jemaat percaya pada integritas pemimpin gereja dalam mengelola dana gereja, namun tetap saja praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan dana gereja sangat diperlukan. Keyakinan spiritual saja tidak cukup sebagai jaminan bahwa tidak akan terjadi penyalahgunaan dana gereja, karena manusia yang tidak sempurna tetap rentan terhadap kesalahan dan godaan. Oleh karena itu, praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana (Prasetya & Fuad, 2017) dan membangun kepercayaan publik yang kuat pada organisasi gereja.

HKBP (*Huria Kristen Batak Protestan*) ialah suatu denominasi gereja Protestan di Indonesia dengan memiliki karakteristik dan perbedaan tersendiri dibandingkan dengan gereja pada umumnya. HKBP merupakan gereja Protestan yang mayoritas anggotanya berasal dari suku Batak di Indonesia, sehingga identitas dan budaya Batak sangat kental terlihat serta unsur budaya Batak sangat kental terlihat dalam perilaku jemaat HKBP. HKBP Cenda Nauli adalah bentuk perluasan pelayanan dari HKBP pusat. HKBP Cendana Nauli telah berdiri sejak tahun 2008 dan berada di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara. Sejak pertama kali berdiri HKBP Cendana Nauli tentu mengalami perkembangan setiap tahunnya, baik dari *asset*, jumlah jemaat gereja, pemasukan dan pengeluaran

dana gereja dan lainnya. Sama seperti gereja lainnya, sumber dana HKBP Cendan Nauli berasal dari persembahan/*pelean*. Jumlah penerimaan *pelean* di HKBP Cendan Nauli mulai tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Jumlah penerimaan *pelean* HKBP Cendan Nauli 2018-2022
Sumber: HKBP Cendana Nauli (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, jumlah penerimaan *pelean* dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penerimaan *pelean* HKBP Cendan Nauli adalah sebesar Rp 96.863.000 dan meningkat 10,1% pada tahun 2019 menjadi Rp 106.654.000. Pada tahun 2020 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 20,8% menjadi Rp 118.212.000. Penerimaan *pelean* kembali meningkat sebesar 6,1% pada tahun 2021 menjadi RP 125.462.000 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 12,9% menjadi Rp 141.638.000.

Penerimaan jumlah *pelean* HKBP Cendana Nauli terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, seberapa besarnya pengaruh akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan gereja pada kepercayaan jemaat sehingga jemaat memberikan dukungan kepada gereja, dalam konteks ini adalah memberikan *pelean*. Penelitian sebelumnya telah

menunjukkan bahwa akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan bisa berpengaruh dalam kepercayaan masyarakat terhadap organisasi nirlaba. Namun, dalam konteks gereja, penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan pada kepercayaan jemaat masih terbatas. Berdasar gagasan Rixon et al. (2014), secara umumnya, penelitian yang dilaksanakan tentang akuntansi gereja berfokus pada 3 tema. Satu, mengeksplorasi ketidakcukupan praktik akuntansi, pengendalian internal dengan buruk serta kurangnya manajemen keuangan di gereja. Dua, mendokumentasikan praktik akuntansi yang baik berbeda dengan praktik yang buruk. Ketiga, meneliti perbedaan diantara aspek spiritual serta non-spiritual ataupun sekuler serta non-sekuler dalam studi sistem akuntansi gereja.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada kepercayaan publik dalam organisasi nirlaba memperlihatkan hasil dengan berbeda. Penelitian terdahulu oleh Imawan et al. (2019) dan Aristi & Azhari (2021) menyebutkan bahwasannya akuntabilitas mempunyai pengaruh pada naik turunnya tingkatan kepercayaan masyarakat. Tidak sama seperti penelitian terdahulu oleh Assa'diyah & Pramono (2019), (Sofyani & Tahar, 2021), dan Junjuran, Asegaf, & Moh (2020) menyebutkan bahwasannya akuntabilitas tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh (Rapindo et al., 2021), Yusra & Riyaldi (2020), Ardini & Asrori (2020), dan Junjuran et al. (2020) yang memaparkan bahwasannya transparansi mempunyai pengaruh pada kepercayaan publik. Sedangkan Aprilia (2019) dan Febriyanti & Devi (2022) menyebutkan bahwasannya transparansi laporan keuangan tidak mempunyai pengaruh pada terhadap tingkat kepercayaan.

Penelitian menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik dilakukan karena kedua faktor ini dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik pada suatu organisasi. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi sebagai pertanggung jawaban pada tindakan ataupun putusan yang sudah diambil. Dalam konteks laporan keuangan, akuntabilitas melibatkan kewajiban untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang diberikan pada laporan keuangan ialah akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, transparansi mengacu pada keterbukaan organisasi dalam menyajikan informasi keuangan dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks laporan keuangan, transparansi dapat dicapai dengan menyajikan informasi keuangan secara terperinci dan mudah dipahami serta menjelaskan secara jelas bagaimana informasi tersebut diperoleh dan diolah.

Meskipun masih terdapat faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh pada kepercayaan publik, akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan dianggap penting karena keduanya berkaitan langsung dengan penyediaan informasi keuangan yang benar dan dapat dipercaya. Kedua faktor ini dapat membantu memperkuat kepercayaan publik pada entitas tersebut dan membantu entitas untuk membangun citra dengan baik didepan publik. Oleh karenanya, penelitian ini berfokus pada dua variabel tersebut untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap *public trust*.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan maka penting untuk memahami seberapa besarnya pengaruh akuntabilitas serta transparansi terhadap kepercayaan publik terutama pada organisasi keagamaan gereja. Oleh karenanya,

peneliti mempunyai ketertarikan guna melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap *Public trust* (Studi pada Jemaat HKBP Cendana Nauli)”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Sesuai latar belakang yang sudah diuraikan, sehingga dapat diidentifikasi masalah yang ada pada penelitian ialah:

1. Kasus kecurangan serta penyalahgunaan dana yang melibatkan organisasi keagamaan yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Beberapa organisasi keagamaan masih mengalami masalah akuntabilitas dan transparansi.
2. Masih banyaknya publik yang terus bertanya mengenai akuntabilitas serta transparansi pada beberapa organisasi keagamaan. Hal ini menyebabkan penerimaan organisasi keagamaan menurun atau tidak sesuai target yang direncanakan karena publik memilih untuk berdonasi di tempat lain yang lebih mereka percayai.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi permasalahan yang tersajikan, maka dilakukan pembatasan masalah dari ruang lingkup penelitian yang dilakukan untuk memfokuskan penelitian supaya tidak keluar pada permasalahan yang ada. Berikut ialah batas permasalahan pada penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian ini difokuskan dalam tiga variabel, yaitu akuntabilitas, dan transparansi sebagai variabel independen dan *public trust* sebagai variabel dependen.

2. *Public trust* yang dimaksud ialah bentuk perilaku jemaat pada hubungan timbal balik yang memberi pengaruh sikap jemaat terhadap pengelolaan keuangan di HKBP Cendana Nauli.
3. Subjek dari penelitian ini adalah jemaat di Gereja HKBP Cendana Nauli.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya permasalahan yang dapat dirumuskan ialah:

1. Apakah secara parsial akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap *public trust*?
2. Apakah secara parsial transparansi mempunyai pengaruh terhadap *public trust*?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap *public trust*?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ialah tujuan penelitiannya:

1. Guna melakukan pengujian pengaruh akuntabilitas terhadap *public trust*.
2. Guna melakukan pengujian transparansi terhadap *public trust*.
3. Guna melakukan pengujian pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap *public trust*.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Harapannya penelitian yang dilakukan mampu memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitiannya mampu memberi pengetahuan, referensi serta wawasan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap *public trust*.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, mampu memberi masukan bagi organisasi keagamaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan administratif mereka. Dengan mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan jemaat, maka organisasi keagamaan dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas.

